

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada proses pemenuhan kebutuhan kehidupan sehari-hari manusia saling membutuhkan satu sama lain. Dimana dalam pemenuhan kebutuhannya terjadi interaksi jual beli di satu sisi terdapat peran sebagai pelaku usaha memiliki peran untuk memproduksi kebutuhan konsumsi manusia, sedangkan disisi lain ada pihak yang disebut dengan konsumen yaitu setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹ Pelaku usaha dan konsumen memiliki peranan yang sangat penting karena keduanya saling melengkapi dalam kegiatan jual beli. Diantara kebutuhan sandang, pangan dan papan yang harus terpenuhi manusia dalam mempertahankan hidup adalah kebutuhan pangan. Untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum masyarakat tidak sepenuhnya membuat sendiri, sehingga terjadilah transaksi jual beli antara pembeli yang dalam hal ini adalah konsumen dan pelaku usaha.

Usaha pangan dapat dikategorikan berdasarkan modal yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan menengah. Salah satu contoh usaha yang dikembangkan oleh masyarakat adalah Pangan Industri Rumah Tangga

¹ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999

(PIRT) yaitu industri pangan yang di produksi di tempat tinggal pemiliknya dengan peralatan pengelolaan manual hingga semi otomatis yang memproduksi pangan olahan tertentu.²

Kota Malang merupakan kota wisata yang selalu ramai dengan pengunjung setiap harinya. Hal tersebut dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang bergerak dibidang makanan tradisional dalam kemasan atau camilan untuk oleh-oleh wisatawan. Demi memperoleh keuntungan yang besar produsen makanan jajanan dalam kemasan tersebut masih banyak yang belum mencantumkan label yang sesuai dengan peraturan Undang-Undang salah satu contoh kasus yang dimuat dalam surat kabar mojokertotimes di Kota Malang ketika Tim Satgas Pangan Malang yang terdiri dari pihak Kepolisian, Dinas Perdagangan, seta Dinas Kesehatan kembali melakukan sidak makanan. Kali ini, sidak menyasar pada produk makanan kadaluwarsa yang menyasar pasar dan salah satu swalayan yang ada di Kota Malang, Jawa Timur . Hasilnya, di kedua tempat itu ditemukan ratusan makanan dan minuman kadaluwarsa. Selain itu, tim juga menemukan makanan dengan kode PIRT sebanyak 14 digit. Seharusnya, aturan terbaru yang diberlakukan sejak 2012 lalu adalah 15 digit.³

Data dari hasil penelitian Eni Suriati dkk tentang “Perlindungan Konsumen Jajanan Bahan Berbahaya di Lingkungan Sekolah” masih banyak ditemui jajanan di lingkungan sekolah hasil dari Produk Industri Rumah Tangga yang tidak memenuhi syarat salah satu contohnya di Aceh

² Pasal 91 ayat 2 Undang-Undang Pangan No.18 Tahun 2012

³<http://www.mojokertotimes.com/baca/173779/20180605/143013/disidak-banyak-makanan-frozen-supermarket-di-kota-batu-kadaluarsa/> , Diakses tanggal 5 Desember 2018.

Besar , hasil data yang ditemukan dalam penelitian dengan mengambil data dari narasumber Ibu Cut Safrina (Kabid Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen BPOM Banda Aceh), terungkap bahwa perlindungan hukum kepada konsumen yang diberikan Balai POM hanya sebatas pengawasan, penarikan pangan jajanan di lingkungan sekolah di Aceh Besar yang mengandung bahan berbahaya dan melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha/penjual dan Dinas Kesehatan tidak ada kewenangan dalam penarikan jajanan yang mengandung bahan berbahaya. Dinas Kesehatan hanya sebatas memberikan pengawasan dan pembinaan terhadap penjual jajanan yang mengandung bahan berbahaya. Kurangnya kesadaran, rendahnya pengetahuan tentang hukum, masih kurangnya penyuluhan, pembinaan, dan pengawasan oleh pemerintah terhadap pelaku usaha dan kurangnya pengetahuan tentang keselamatan konsumen oleh pelaku usaha dalam menjual jajanannya. Pelaku usaha lebih mengejar keuntungan dibandingkan memperhatikan tanggung jawabnya.⁴

Dari hasil data yang terdapat dalam website BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) pada tahun 2017 OPGABNAS (Oprasi Gabungan Nasional) digelar secara serentak pada tanggal 05 - 06 September 2017 oleh Balai Besar/Balai POM seluruh Indonesia dan melibatkan lintas sektor seperti Kepolisian Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan maupun pemangku kepentingan lain khususnya terkait penegakan hukum ditemukan sejumlah Temuan Oprasi Gabungan

⁴ Eni Suriati, dkk, “ *Perlindungan Konsumen Jajanan Bahan Berbahaya di Lingkungan Sekolah*”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.20 No.3, Desember 2018, Hlm 502-203

Nasional tahun 2017 ini ditindak lanjuti secara non-projustisia sebanyak 111 kasus (63,07%) dan pro-justisia sebanyak 65 kasus (36,93%) yang terdiri dari 16 (9,09%) kasus terkait obat diedarkan tanpa kewenangan dan keahlian, 5 (2,84%) kasus terkait obat tanpa izin edar, 7 (3,98%) kasus terkait obat tradisional tanpa izin edar, 24 (13,64%) kasus kosmetik tanpa izin edar, dan 8 (4,55%) kasus terkait pangan tanpa izin edar, 4 (2,27%) kasus terkait Pangan Berbahaya (Pangan BB) serta 1 (0,57%) kasus terkait pangan kadaluarsa/ rusak. Dari pelanggaran ini, sebagian besar merupakan pelanggaran tanpa izin edar, dan tanpa kewenangan dan keahlian.⁵

Dalam Peraturan Pemerintah tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan diamanatkan bahwa pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga wajib memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) dan menjelaskan bahwa produk Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) yang dibebaskan dari kewajiban memiliki surat persetujuan pendaftaran sertifikat produksi Pangan Industri Rumah Tangga yaitu pangan yang : mempunyai masa simpan kurang dari tujuh hari pada suhu kamar atau dimasukkan kedalam wilayah Indonesia dalam jumlah kecil untuk keperluan penelitian atau konsumsi sendiri.⁶

Terdapat beberapa jenis pangan yang tidak boleh diproduksi oleh IRTP, di antaranya adalah: susu dan hasil olahannya, daging, ikan unggas dan hasil olahannya yang memerlukan proses atau penyimpanan beku, pangan kaleng berasam rendah, pangan bayi, minuman beralkhol, air

⁵ https://www.pom.go.id/new/browse/more/laporan_tahunan/20-06-2018/20-06-2019/1, Laporan Tahunan BPOM Tahun 2017 , Diakses 5 Desember 2018, Hlm

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Pasal 43 dan 44

minum dalam kemasan, pangan lain yang wajib memenuhi syarat SNI, dan pangan lain yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Label dan Iklan Pangan telah diatur mengenai kriteria pemenuhan syarat kelompok unsur teknis pencantuman label.⁷

Kriteria label diantaranya adalah dicantumkan di kemasan pangan yang terletak pada sisi kemasan pangan sehingga mudah untuk dilihat dan dibaca, serta label tidak mudah lepas dari kemasan, luntur ataupun rusak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa letak label pada produk Pangan Industri Rumah Tangga bervariasi. Letak label terbanyak adalah yang tercetak langsung pada kemasan (76%), diikuti dengan label yang tercetak pada kertas yang diletakkan di sisi bagian dalam kemasan (untuk kemasan transparan) ditempelkan pada bagian luar kemasan (3%).⁸ Sedangkan kriteria iklan pangan adalah setiap iklan tentang pangan yang diperdagangkan wajib memuat keterangan mengenai pangan secara benar dan tidak menyesatkan, baik dalam bentuk gambar dan atau suara, pernyataan, dan atau bentuk apapun lainnya. Setiap Iklan tentang pangan tidak boleh bertentangan dengan norma-norma kesusilaan dan ketertiban umum.⁹

Suatu produk makanan dan minuman yang tidak memenuhi standar kesehatan dapat berpengaruh kepada kecerdasan seseorang, karena itu sebagai bangsa yang bercita-cita memajukan kesejahteraan umum dan

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan

⁸ Wiwit Arif Wijaya, dkk " *Pemenuhan Regulasi Pelabelan Produk Industri Rumah Tangga (IRTP) di Bogor*", Jurnal Mutu Pangan, Vol.1 No.1 ,Th.2014, Hlm 67

⁹ Pasal 44 Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan

mencerdaskan kehidupan bangsa sejak dini kita harus menjaga kualitas pangan yang kita konsumsi sehari-hari. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bagian keenambelas telah mengatur pengamanan makanan dan minuman dalam Pasal 109 yang berbunyi “ setiap orang dan atau badan hukum yang memproduksi, serta mendistribusikan makanan dan minuman yang diberlakukan sebagai makanan dan minuman hasil teknologi rekayasa genetik yang diedarkan harus menjamin agar aman bagi manusia, hewan yang dimakan manusia dan lingkungan”, pada Pasal 110 yang berbunyi “ setiap orang dan atau badan hukum yang memproduksi dan mempromosikan produk makanan dan minuman dan/ atau yang diperlakukan sebagai makanan dan minuman hasil olahan teknologi dilarang menggunakan kata-kata yang mengecoh dan/atau yang disertai klaim yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya”.

Banyak pengalaman buruk yang dialami konsumen dalam hal rendahnya standar kualitas pangan. Akhir-akhir ini sering terdengar berita keracunan makanan setelah mengkonsumsi makanan yang tidak jelas tanggal kadaluwarsanya maupun adanya bahan makanan yang berbahaya dalam makanan tersebut. Adapula makanan yang mengandung bahan berbahaya tapi efeknya baru akan terasa dalam jangka waktu yang lama. Berdasarkan laporan tahunan di website Badan Pengawas Obat dan Makanan Selama tahun 2017 Badan POM telah mencatat 57 berita keracunan pangan yang diperoleh dari media massa sebanyak 53 kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan dilaporkan oleh 34 BB/BPOM di

seluruh Indonesia. Laporan tersebut diperoleh dari Dinas Kesehatan Propinsi maupun Kabupaten/Kota di 34 Propinsi. kasus KLB keracunan pangan yang dilaporkan sebanyak 2041 orang sakit dan 3 orang meninggal dunia. Ditinjau dari jenis pangan, penyebab KLB Keracunan Pangan tahun 2017 adalah masakan hasil Pangan Industri Rumah Tangga 20 kejadian (37,74%) kejadian, pangan jajanan/siap saji sebanyak 6 kejadian (11,32%) kejadian, diikuti pangan olahan dan pangan jasa boga masing-masing sebanyak 7 kejadian (13,21%) kejadian.¹⁰

Konsumen dalam membeli makanan dan minuman kemasan harus mendapat jaminan kesehatan, keselamatan dan keamanan. Terhadap kerugian yang diderita konsumen seharusnya dapat melakukan tindakan-tindakan untuk mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dilakukan pada saat sebelum transaksi dan atau pada saat setelah terjadinya transaksi. Perlindungan hukum terhadap konsumen yang dapat dilakukan pada saat sebelum terjadi transaksi dapat dilakukan dengan cara Undang-Undang dan pemahaman dari diri sendiri. Perlindungan hukum terhadap konsumen pada saat setelah terjadi transaksi dapat dilakukan melalui jalur Pengadilan Negeri atau diluar Pengadilan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berdasarkan para pihak yang bersengketa.¹¹

¹⁰ https://www.pom.go.id/new/browse/more/laporan_tahunan/20-06-2018/20-06-2019/1, Laporan Tahunan BPOM Tahun 2017, Hlm 148-149

¹¹ Nor Faizah , dkk, “*Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Mengonsumsi Makanan dan Minuman Kemasan di Kota Semarang*”, Jurnal Hukum Kesehatan, Vol.1 No.1, Th 2015, Hlm 61-62

Penegakan kasus pelanggaran perlindungan konsumen yang dijelaskan dalam web Laporan Tahunan Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2017 ditindak lanjuti dengan non-justisia yaitu diberikan sanksi administratif diantaranya pemusnahan terhadap produk yang ditemukan. Selain itu, juga dilakukan investigasi awal dan penelusuran lanjutan sehingga ditemukan bukti yang cukup untuk tindak lanjut *pro-justisia*. Sementara terhadap pelaku yang terlibat akan ditindaklanjuti secara pro-justitia apabila terpenuhi 2 alat bukti yang sah. Berikut ini adalah kisaran putusan pengadilan terhadap tindak pidana bidang makanan pada tahun 2017 sebagai berikut, Berdasarkan ancaman pidana : UU No.18 Tahun 2012 tentang pangan yaitu pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp10 Milyar, berdasarkan putusan pengadilan terendah percobaan 1 tahun (mengedarkan pangan tanpa izin edar) kasus BBPOM di Samarinda, berdasarkan putusan pengadilan tertinggi pidana penjara 2 tahun (mengedarkan pangan tanpa izin edar) kasus BBPOM di Mataram.¹²

Dalam penyidikan kasus perlindungan konsumen selain penyidik Polisi Negara Republik Indonesia , kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugasnya dan tanggung jawabnya dibidang perlindungan konsumen juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam

¹² https://www.pom.go.id/new/browse/more/laporan_tahunan/20-06-2018/20-06-2019/1, Laporan Tahunan BPOM Tahun 2017

Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.¹³ Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen, b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen, c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan konsumen, d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen, e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti serta melakukan penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan konsumen, f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.¹⁴ Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk Pemerintah Kota Malang dalam penegakan hukum perlindungan konsumen produk Pangan Industri Rumah Tangga adalah Dinas Kesehatan Kota Malang, Dinas Perdagangan Kota Malang, Kepolisian Kota Malang.

¹³ Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bab XII Penyidikan Pasal 59 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Bab XIX Penyidikan Pasal 189 ayat (1)

¹⁴ Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bab XII Penyidikan Pasal 59 ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Bab XIX Penyidikan Pasal 189 ayat (2)

Pada dasarnya perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia, oleh karena itu menjadi harapan bagi semua bangsa didunia untuk dapat mewujudkannya. Dalam Undang-Undang telah memberikan ketentuan penjara untuk sanksi pidana, hukuman denda dan sanksi tambahan jika produsen makanan tidak taat peraturan. Dalam kenyataannya masih terjadi beberapa ketidakseimbangan antara Undang-Undang dan putusan hakim. Ini mungkin terjadi karena Hukum Perlindungan hak-hak konsumen belum dipahami dengan baik, dalam putusannya penegak hukum mempertimbangkan tindak pidana terhadap bidang pangan adalah sama dengan kejahatan umum bukan sebagai kekerasan yang serius, penuntutan pidana dari jaksa yang jauh dari kepastian maksimum dalam hukum juga mempengaruhi ketidakpatuhan para produsen makanan pada Undang-Undang yang berlaku.¹⁵

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut Penulis bermaksud mengkaji hal yang lebih dalam mengenai **“Penegakan Hukum Perizinan Peredaran Produk Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) Dalam Prespektif Perlindungan Konsumen di Kota Malang”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur perizinan peredaran produk Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) di Kota Malang?
2. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum perlindungan konsumen produk Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) di Kota Malang ?

¹⁵ Fifik Wiryani, dkk *“Juridical Analysis On Consumer Protection In Safe And Halal Food Distribution”*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.18 No.1, Januari 2018, Hlm 27

3. Bagaimana permasalahan yang terjadi dan upaya apa yang dilakukan oleh penegak hukum dalam menegakkan perlindungan konsumen produk Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) di Kota Malang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan perijinan peredaran produk PIRT di Kota Malang
2. Untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum perlindungan konsumen produk Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) di Kota Malang
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dan upaya yang selama ini dialami oleh penegak hukum dalam menjalankan tugasnya

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- 1) Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber pemikiran dan pengembangan wawasan ilmu pengetahuan hukum tentang perlindungan konsumen pada umumnya dan khususnya perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengkonsumsi produk P-IRT di kota Malang
- 2) Sebagai landasan untuk penulis yang lain yang tertarik untuk mengkaji ruang lingkup studi hukum tentang perlindungan konsumen pada umumnya dan/atau lebih khususnya perlindungan hukum terhadap konsumen terhadap produk P-IRT

yang tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan per Undang-Undangan.

2. Manfaat Praktis

1) Bagi Mahasiswa

Selain sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum, harapannya terhadap penelitian ini mendapatkan wawasan tentang penegakan hukum produk Pangan Industri Rumah Tangga dalam perspektif perlindungan konsumen.

2) Bagi Pemerintah

Diharapkan untuk dijadikan sebagai masukan untuk penyusunan produk hukum kaitanya dengan perlindungan konsumen.

3) Bagi masyarakat

Dapat dijadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan serta meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai kontrol sosial terhadap peredaran produk P-IRT yang tidak berlabel dipasaran. Serta sebagai pedoman agar masyarakat lebih menyadari akan adanya hukum perlindungan konsumen.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan secara mendalam terhadap

suatu lembaga atau gejala tertentu dan dihubungkan dengan peraturan yang ada.¹⁶

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di lokasi pertama yaitu Dinas Kesehatan Kota Malang yang beralamat di Jalan Simpang L.A Sucipto 45 Malang. Lokasi kedua yaitu POLRES Malang Kota yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto No.19, Kecamatan Klojen, Malang. Lokasi ketiga yaitu Dinas Perdagangan Kota Malang yang beralamat di Jalan Simpang Terusan Danau Sentani No.3, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Alasan menjadikan ketiga lokasi tersebut sebagai tempat penelitian karena instansi yang dituju memiliki kewenangan dalam penegakan hukum perizinan peredaran produk Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dalam prespektif perlindungan konsumen di Kota Malang.

3. Sumber Data

Sumber data adalah data yang digunakan untuk melengkapi data penelitian. Sumber data meliputi, sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier. Adapun sumber data tersebut yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat langsung dari lokasi penelitian, yaitu dengan menggunakan metode wawancara dengan responden di lokasi penelitian yang sekiranya mempunyai

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta; Rajawali Press, 2003)

informasi mengenai fokus pembahasan yang akan diteliti oleh peneliti dan studi kepustakaan, yaitu tentang penegakan hukum perizinan peredaran produk Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dalam prespektif perlindungan konsumen.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, yang mencakup:

- 1) Buku – buku yang berkaitan dengan tema penelitian, yaitu tentang penegakan hukum perizinan peredaran produk Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dalam prespektif perlindungan konsumen.
- 2) Jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian;
- 3) Hasil karya dari kalangan hukum yang berkaitan dengan judul penelitian terdahulu;

c. Data Tersier

Data tersier adalah data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder yaitu, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih. Wawancara penelitian adalah suatu metode penelitian yang meliputi pengumpulan data melalui interaksi verbal secara langsung antara pewawancara dan responden yang mengetahui permasalahan maupun yang terlibat langsung dalam masalah (tokoh adat). Wawancara dilakukan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui penegakan hukum perizinan peredaran produk Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dalam perspektif perlindungan konsumen di Kota Malang.

Wawancara ini dilakukan terhadap responden yang berhubungan langsung dengan objek penelitian, diantaranya sebagai berikut :

- 1) Ibu Dra. Chusnul Arifiati, Apt. selaku Kasie Kefarmasian Dinas Kesehatan Kota Malang , pada tanggal 22 Maret 2019
- 2) Bapak Didik.SP selaku Kepala KANIT 3 TIPIDTER Polres Malang Kota , Pada tanggal 25 Januari 2019
- 3) Ibu Eka Wilantari selaku Kepala Seksi Tertib Niaga Dinas Perdagangan Kota Malang, Pada tanggal 20 Februari 2019

b. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelusuri bahan bacaan baik berupa jurnal, buku, peraturan perundang-undangan terkait dengan

penegakan hukum perizinan peredaran produk Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dalam perspektif perlindungan konsumen,, dan bahan bacaan lain yang dapat memberikan dukungan teori terkait permasalahan dalam penelitian.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan baik itu catatan transkrip, buku, surat kabar, agenda, dll.¹⁷ Dalam penelitian ini adapun data yang dapat di kumpulkan melalui metode dokumentasi yaitu :

- 1) Daftar kategori pangan yang layak dan tidak untuk mendapatkan SPP-IRT di Kota Malang pada tahun 2018.
- 2) Data produk dan faktor penyebab tidak lolosnya sertifikasi P-IRT tahun 2018.
- 3) Hasil uji Lab PIRT yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Malang Tahun 2018.

5. Analisis Data

Untuk memecahkan permasalahan pada topik yang dibahas, peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis sehingga dapat digunakan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

¹⁷ Drs. Margono S “*Metode pendidikan komponen MKDK*”, PT. Rineka cipta Jakarta tahun 2007

Analisis data kualitatif sebagai cara penjabaran data berdasarkan hasil temuan di lapangan dan studi kepustakaan, kemudian disusun dan dilakukan pengolahan data. Sehingga menghasilkan sajian data yang dijadikan kesimpulan dan dapat dipahami mengenai penegakan hukum perizinan peredaran produk Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dalam perspektif perlindungan konsumen.

F. Sistematika Penelitian

Hasil penelitian yang diperoleh setelah dilakukan analisis kemudian disusun dalam bentuk laporan akhir dengan sistematika penulisan berikut :

BAB I : PENDAHULUAN, berisi tentang uraian latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA, berisi uraian tentang Pangan Industri Rumah Tangga, izin produk Pangan Industri Rumah Tangga, label, konsumen, pelaku usaha, perlindungan konsumen serta penegak hukum terkait perizinan produk Pangan Industri Rumah Tangga.

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN, merupakan bab yang berisikan tentang pembahasan hasil penelitian yang berupa observasi dan wawancara yang kemudian dianalisa secara

sistematis berdasarkan pada tinjauan pustaka sebagaimana terdapat di Bab II.

BAB IV : PENUTUP, berisikan kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dan disertai dengan saran-saran sebagai rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian.

